

**SANG PELAUT DARI BELITUNG:
DAMPAK TINGGAL DI DARAT TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL-
BUDAYA SUKU SAWANG (1936-2012)**

Oleh

Eki Ripan J.P.R Tanjung dan Leli Yulifar¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika kehidupan maritim Suku Laut Sawang Belitung yang merupakan Suku Laut yang ada di Pulau Belitung. Pada tahun 1936, semenjak Orang Sawang mulai banyak dipekerjakan di pertambangan timah Belanda, hingga dilakukan kebijakan relokasi ke daratan Belitung oleh Pemerintah Indonesia yang dimulai tahun 1970 hingga tahun 2012 telah memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan serta keberlangsungan dari kebudayaan maritim Suku Sawang ketika perlahan menetap di daratan. Adapun dampak positif yang terjadi tentu mendorong Orang Sawang untuk beradaptasi pada perkembangan zaman serta berbaur dengan masyarakat di daratan Belitung. Mengenai dampak negatif yang terjadi adalah semakin terkikisnya kebudayaan maritim yang bersifat positif dari Suku Sawang seperti unsur bahasa, kesenian, pengetahuan serta nilai-nilai kemaritiman seiring semakin berkurangnya jumlah Orang Sawang asli di Pulau Belitung.

Kata Kunci: Suku Sawang, Pulau Belitung, Relokasi, Perubahan Sosial Budaya, Budaya Maritim

ABSTRACT

This study aimed to describe the dynamics life of Sawang People as a Sea Nomads in Belitung Island. In 1936, since Sawang People start to be employed in Dutch mining, until the relocation policy by Indonesian government that carried out the relocation from the sea to the land from 1970 to 2012, already have some positive and negative impact against the sustainability of maritime culture of Sawang People as they began settled on land. The Positive impact is force Sawang People to adapt with the age of development and mingle with the Belitung community on land. The Negative impact caused some positive maritime culture of Sawang became nearly extinct like the language of Sawang, art, traditional knowledge, and maritime values in line with decreasing of native Sawang People on Belitung Island.

Keywords: *Sawang Tribe, Belitung Island, Relocation, Sosio-Cultural Changes, Maritime Culture.*

¹ Penulis adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Leli Yulifar (Pembimbing I). Penulis dapat dihubungi melalui nomor 08117110972/Email: ekiripanpratama@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sejatinya merupakan negara maritim (*maritime state*). Secara geografis Indonesia merupakan negara laut terbesar di dunia. Luas lautnya 3,1 juta km, dengan panjang garis pantai 81.000 km. Di tengah laut tersebut ditaburi 17.508 pulau besar dan kecil, (Dahuri, dkk dalam Hamid, 2013, hlm. 1). Sebagai negara maritim atau negara kelautan, Indonesia memang memiliki budaya kelautan yang amat kaya. Budaya tersebut dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang memegang teguh pandangannya terhadap kearifan lokal di laut. Kelompok masyarakat tersebut adalah Suku Laut atau Orang Laut.

Orang Laut di Bangka Belitung sendiri dinamai *orang Sekak, Sekat*, atau *Sika*, namun penamaan Sekak tersebut kurang disukai oleh mereka karena mengandung arti “primitif” atau “terbelakang” sehingga mereka menamakan diri mereka sebagai Suku Sawang. Pendapat lain mengatakan bahwa Suku Laut di Belitung yang dikenal dengan sebutan Suku Sekak berasal dari Suku Sakai di Teluk Lanao, Filipina. Pendapat lainnya mengacu pada struktur kelembagaan

“*batin*” (Kepala Suku) Suku Sawang di Belitung identik dengan istilah “*batin*” dalam Suku Sakai (Salman, dkk, 2011, hlm. 127-128). Sebagai Suku Laut, Orang Sawang memang hidup di atas perahu dalam arti yang sebenarnya dengan tradisi yang juga berhubungan dengan alam dan laut. Suku Sawang diperkirakan sudah ada di pulau Belitung sejak abad ke-16 atau 17.

Pada tahun 1851 kolonial Belanda untuk pertama kalinya melakukan eksplorasi penambangan timah di Pulau Belitung. Setelah melalui perjalanan panjang, kolonial Belanda berhasil mendirikan perusahaan timah yang juga tidak lepas dari peran Orang-orang Sawang. Pada tanggal 15 November 1860, perusahaan pertambangan timah berdiri dengan nama *Billiton Maatschappy*. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta milik orang Belanda yang bekerja sama dengan Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Belanda. Pada tahun 1866, *Billiton Maatschappy* masih terus mendatangkan pekerja dari negeri Tiongkok hingga berjumlah 2724 orang, dan pada tanggal 9

September 1924, *Billiton Maatschappy* berubah nama menjadi NV GMB atau *NV Gemeenschapelyke Mynbouw Maatschappy Billiton* (Guna, 2014, hlm. 28-29).

Pada tahun 1936 tersebut perlahan-lahan banyak Orang Sawang yang bekerja di perusahaan timah yang dikelola oleh Belanda sehingga sebagian besar Orang Sawang mulai bertempat tinggal jauh dari pantai. Selain dipekerjakan, pada masa pemerintahan Hindia-Belanda di Belitung ternyata orang-orang Sawang juga telah dirumahkan atau diberikan tempat tinggal untuk pertama kalinya agar memudahkan mengontrol dan memobilisasi orang-orang laut dalam bekerja yang dipandang masih sebagai orang-orang yang primitif dan terpencil. Perumahan Orang Sawang tersebut bisa ditemui di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung Belitung Timur dan di daerah Birok di Tanjung Pandan.

Kondisi tersebut serupa namun berbeda masa pemerintahan dan tujuannya ketika adanya kebijakan pemerintah Belitung dalam program pengembangan Komunitas Adat Terpencil tahun 1970-an, yang melakukan relokasi pemukiman ke

darat yang telah mengubah pola pikir dan pola usaha Suku Laut (Salman, dkk, 2011, hlm. 128). Usaha pemberdayaan tersebut oleh Departemen Sosial dilaksanakan dalam program pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi Suku Laut yang dianggap terpencil. Usaha pemberdayaan yang dilakukan sejak tahun 1970 tersebut dilakukan dengan relokasi pemukiman yang diberi nama Kampung Laut. Upaya pemberdayaan yang kedua dilakukan sekitar tahun 1985 dengan membuatkan mereka rumah tinggal yang berdekatan dengan Sungai Cerucuk (Desa Juru Seberang) (Fithrorozi, 2009, hlm. 44). Hingga akhirnya tahun 2012 setelah sebelumnya dilakukan survey terakhir oleh Kementrian Sosial RI bahwa satu daerah di Kabupaten Belitung yaitu Desa Pulau Batu sudah bebas dari katagori daerah KAT yang diikuti dengan pemberhentian bantuan dana pemberdayaan KAT oleh pemerintah pusat.

Upaya merumahkan orang Sawang itu dinilai mengakibatkan tercabutnya orang Sawang dari akar budayanya karena selama ratusan tahun nenek moyang orang Sawang

membangun budaya bahari sebagai pedoman hidup dan kerangka adaptasi mereka hidup di laut. Masyarakat Sawang di Belitung menghadapi permasalahan yang kompleks antara lain beban diskriminasi yang memiliki sejarah panjang. Setelah mereka dimukimkan di darat, orang Sawang menjadi terasing dengan kehidupan budaya, sistem ekonomi, dan sistem religi mereka sendiri. Selain itu identitas kultural mereka sebagai orang Laut juga semakin memudar ketika kehidupan sehari-hari mereka tidak ada hubungannya dengan laut (Purwana, 2015, hlm. 180).

Dari beberapa pokok pikiran yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dibahas dalam kajian penelitian yaitu; Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan untuk tinggal di darat terhadap kelestarian budaya Suku Sawang di Pulau Belitung tahun 1936-2012? Agar penelitian menjadi lebih terfokus maka penulis membatasi dalam beberapa pertanyaan penelitian yakni; 1) Bagaimanakah latar belakang kehidupan Suku Sawang di Belitung sebelum tahun 1936? 2) Bagaimanakah dinamika kehidupan

Suku Sawang Belitung pasca tahun 1936 sampai dengan tahun 1970? 3) Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong diberlakukannya kebijakan tinggal di darat terhadap Suku Sawang oleh pemerintah daerah tahun 1970-2012? 4) Bagaimanakah kondisi sosial-budaya, dan ekonomi komunitas adat Suku Sawang pasca diberlakukannya kebijakan tinggal di darat bagi Suku Sawang di Belitung tahun 1970-2012? Dari latar belakang tersebut juga terdapat tujuan penelitian yakni untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari kebijakan untuk tinggal di darat terhadap kelestarian budaya Suku Sawang di Pulau Belitung tahun 1936-2012.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi untuk menambah referensi dan memperkaya penulisan sejarah lokal daerah Belitung itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Belitung dengan penelitian yang dilakukan oleh putra daerah sendiri berkaitan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan dari program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Sehingga diharapkan setelah dilakukannya

penelitian ini akan ada regulasi yang tepat dari pemerintah terkait dengan pelestarian kebudayaan positif Suku Sawang di tengah pesatnya pariwisata dan arus globalisasi di Pulau Belitung. Hingga akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah referensi bagi masyarakat mengenai eksistensi Suku Sawang dan kebudayaan positifnya serta mengajak untuk melestarikannya dan selanjutnya dapat memberikan sumbangan referensi dan pengetahuan bagi para akademisi yang kemudian diharapkan dari peneliti sendiri untuk penelitiannya lebih dikembangkan.

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi yang digunakan penulis adalah metode historis dengan pendekatan multidisipliner yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya yakni Sosiologi dan Antropologi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik studi pustaka, wawancara dan studi dokumentasi. Metode historis adalah suatu proses pengujian dan menguji secara kritis rekaman peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986, hlm. 32). Dalam melakukan penelitian

penulisan mengikuti langkah-langkah penelitian yang secara singkat diungkapkan oleh Ismaun (2005, hlm. 49) dengan empat langkah dalam penelitian sejarah yakni; 1) Heuristik atau pencarian sumber sejarah, 2) kritik sumber (Eksternal dan Internal), 3) Interpretasi, 4) dan Historiografi atau penulisan sejarah.

Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, langkah pertama yang penulis lakukan adalah heuristik atau pengumpulan sumber, baik itu sumber tulisan, sumber lisan, ataupun sumber benda. Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi atau evidensi sejarah adalah kegiatan yang banyak menyita waktu, tenaga, pikiran, dan juga perasaan (Sjamsuddin, 2007, hlm. 86). Dalam proses pengumpulan sumber tertulis, penulis lakukan dengan mengunjungi beberapa universitas, mengunjungi lembaga atau instansi terkait, ataupun mengunjungi toko-toko buku. Diantara tempat pencarian sumber yang penulis kunjungi adalah Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Belitung dimana penulis cukup banyak mendapatkan sumber tertulis yang mendukung dalam

penelitian. Adapun pengumpulan sumber lisan dilakukan dengan mencari tokoh atau individu yang relevan dan memiliki kompetensi terkait permasalahan yang dikaji sehingga penulis akan memperoleh informasi yang mendukung dalam proses penelitian. Narasumber lisan penulis bagi menjadi tiga kategori yakni dari pihak pemerintah daerah setempat yang terkait, dari kalangan sejarawan dan budayawan Belitung, kemudian dari kalangan Orang Sawang serta masyarakat sekitar.

Setelah pada tahap sebelumnya sudah di dapatkan sumber tulisan, sumber lisan dan sumber benda, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah kritik pada sumber sejarah tersebut. Karena nya penulis tidak bisa percaya begitu saja terhadap sumber-sumber sejarah yang didapatkan sehingga harus dilakukan kritik untuk memperoleh kebenaran sejarah. Kritik yang penulis lakukan terbagi menjadi dua yakni, kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal sendiri bertujuan untuk menguji otentitas (keaslian) suatu sumber agar diperoleh sumber yang benar-benar asli dan bukan tiruan. Kritik internal merupakan kebalikan dari kritik

eksternal. Kritik internal merupakan penilaian terhadap aspek “dalam”, yaitu isi dari sumber sejarah setelah sebelumnya disaring melalui kritik eksternal (Sjamsuddin, 2007, hlm. 143).

Pada kritik sumber ini, penulis melakukan kritik terhadap sumber tertulis dan sumber lisan yang penulis dapatkan. Dalam melakukan kritik eksternal terhadap sumber tertulis, penulis memperhatikan aspek akademis dari penulis buku yaitu dengan melihat latar belakang dari penulis itu sendiri untuk memastikan keotentisitasannya, melihat tahun terbit dari buku tersebut, penerbit buku dan dimana buku tersebut diterbitkan. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebutlah penulis akan menentukan apakah sumber tertulis tersebut layak dijadikan sebagai acuan referensi atau tidak.

Setelah melakukan kritik terhadap sumber baik internal maupun eksternal, selanjutnya yang harus dilakukan adalah interpretasi atau proses penafsiran sumber. Sjamsuddin sendiri dalam bukunya (2007, hlm. 158-159) memberikan penjelasan mengenai interpretasi itu sendiri bahwa “...interpretasi adalah

penafsiran terhadap fakta-fakta yang penulis dapatkan sehingga nanti akan ditemukan suatu keberartian yang kemudian akan dapat dituliskan secara utuh...”

Langkah terakhir dari metode sejarah adalah historiografi atau tahap penulisan sejarah. Menurut Abdurrahman (2007, hlm. 26) menyatakan “...historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan...” Historiografi merupakan hasil dari upaya penulis mengerahkan kemampuan menganalisa dan mengkritik sumber yang diperoleh kemudian dihasilkan sintesis dari penelitiannya yang terwujud dalam laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hubungannya dengan sejarah maritim Indonesia khususnya di wilayah Pulau Belitung, nama Suku Laut Sawang tentunya tak bisa dilupakan dalam catatan panjang sejarah bahari Nusantara sebagai salah satu kekuatan yang menggerakkan dinamika kemaritiman di pulau tersebut. Berbicara mengenai sejarah dari kehidupan Suku Laut Sawang di

Pulau Belitung ini juga tidak lepas dari bagaimana pengaruh jalur pelayaran perdagangan nusantara yang pada masa lalu juga ramai melintasi perairan sekitar Pulau Bangka Belitung. Suku Laut sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut, mereka terdiri dari nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan dan memiliki interaksi sosial yang masih rendah, baik interaksi sosial disektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan (Erwin, 2015, hlm. 5).

Orang Laut atau ada juga yang menyebutnya sebagai orang perahu asli dicirikan kepada kebiasaan mereka yang memang tinggal dan hidup diatas perahu dalam arti sebenarnya. Mereka hidup dalam kumpulan keluarga yang terdiri dari keluarga yang terdiri dari anak istri sekitar 5-6 orang. Mereka dikenal sebagai perenang yang mahir, penyelam yang unggul, dan pelaut yang sangat handal. Mereka membuat perahu mereka sendiri dan melengkapinya dengan peralatan

untuk menangkap ikan, yakni panah sebelum mereka mengenal jala (Hoogstad, 2009, hlm. 12).

Orang Sawang atau Orang Sekak menurut Melalatoa (1995) (dalam Purwana, 2015, hlm. 184) adalah kelompok etnik yang hidupnya berpindah-pindah di laut kawasan pantai pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Bangka serta Pulau Belitung. Di Pulau Bangka, mereka terutama menyebar di daerah Lepar Pongok dan Pangkalan Baru. Di Pulau Belitung mereka menyebar di daerah Membalong dan beberapa daerah lainnya. Orang Sekak di Bangka sering juga disebut orang *Sakai* atau orang *Mapur* karena sebagian besar kehidupannya dihabiskan di laut, kadang mereka juga disebut orang Laut. Di Belitung mereka dikenal sebagai orang *Ameng Sewang*. Bahasa Sekak termasuk rumpun bahasa Melayu namun dialek bahasa Sekak sangat berbeda dengan dialek bahasa suku bangsa asli lainnya di daerah tersebut. Mengenai asal-usul dari Orang Sawang sendiri sebenarnya masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari berbagai sumber yang di dapatkan baik itu dari sumber tulisan, lisan, maupun penelitian-

penelitian terdahulu dapat dibagi dua pendapat mengenai asal-usul dari Suku Sawang itu sendiri yakni:

1. Berasal dari Daerah Semenanjung Tanah Melayu, Johor Malaysia (Lebih kepada cerita turun-temurun dari kalangan Orang Sawang dan masyarakat Belitung)
2. Berasal dari daerah Filipina Selatan, berdasarkan penelitian terdahulu dan literatur yang ada Suku Sawang itu sendiri berasal dari daerah Luzon Filipina Selatan dan bermigrasi serta menyebar sampai ke Kepulauan Riau hingga Bangka Belitung (Salim Y.A.H, Wawancara tanggal 30 Desember 2015).

Dalam buku yang berjudul *Tahun-tahun Pertama Dari Perusahaan Belitung* yang merupakan kumpulan catatan perjalanan seorang bernama J.F. Loudon mengenai tahun-tahun pertama dimulainya eksploitasi pertambangan timah di Belitung yang di terbitkan dan terjemahkan oleh Kantor Arsipus Kab. Belitung dengan Yayasan Budsya Mukti Bandung, meskipun tentu bersifat

Nerlandosentris digambarkan pula mengenai Orang-orang Sawang yang juga dilibatkan dalam proses eksplorasi tambang timah di Pulau Belitung dikarenakan kemampuan fisik yang kuat dan kemampuan Orang Sawang dalam melaut dan menjelajah kawasan Pulau Belitung hingga dijuluki Orang Belanda dengan *Sekah* yang artinya kuat perkasa.

Orang Sekak di Belitung menamai dirinya *Manih Bajau* yang artinya “turunan bajak laut”. Hal ini menunjukkan mereka memiliki kebanggaan terhadap peran mereka menguasai lautan seperti yang diungkapkan oleh Ian Sanchin (dalam Fithrorozi, Suku Laut, Pesisir, dan Budaya maritim, Kolom, Warta Praja, Edisi 09/Th IV/September 2009):

Pemerintah di Batavia pernah melakukan pembasmian perompak laut secara besar-besaran pada tahun 1838, pembasmian bajak laut di Belitung dipimpin oleh JJ Roy. Peran Lanun yang disegani pun menjadi meredup dan menjadi kelompok kecil. Kemudian mereka beradaptasi dengan yang hidup di darat pada masa berdirinya perusahaan timah. Mereka menjadi pekerja atau buruh kasar pertambangan timah terutama di Belitung. Namun dalam publikasi Belanda (Gedenboek Van Billiton, 1927) buruh kasar yang dipekerjakan

perusahaan Belanda NV.GMB adalah Suku Sekak bukan Lanun sebagai mana Ian Sanchin sebutkan di atas (hlm. 43).

Dari apa yang tercatat di dalam sejarah dari beberapa literatur yang berasal dari penulis Belanda mengenai para Suku Sekah di Belitung nampaknya memang bertema *Nerlandosentris* dengan pihak kolonial yang dianggap sebagai pembawa peradaban dan penegak hukum serta para Lanun digambarkan sebagai perompak dengan keterlibatannya dalam kasus pembajakan serta perampokan disertai pembunuhan dan membuat kekacauan di berbagai daerah (Fithrorozi, Menelusuri Jalur Pelayaran Belitung, kolom, Warta Praja, Edisi 2/ThII/Februari 2007, hlm. 15). Hingga akhirnya Kolonial Belanda pun menjadi kekuatan yang dominan dengan melalui sistem kapitalis yang diwakili dengan tambang timahnya. Namun pada tahun-tahun sebelum tahun 1936, Belanda dengan tambang timahnya masih banyak mempekerjakan buruh-buruh kasar dari Tiongkok.

Hingga pada tahun 1936 yang merupakan masa akhir pemerintahan Hindia-Belanda di Nusantara Orang-

orang Sawang mulai direkrut untuk dipekerjakan di perusahaan tambang Timah Belanda yang telah bernama NV GMB atau NV *Gemeenschapelyke Mynbouw Maatschappy Billiton*. Tubuh orang Sawang yang tinggi dan tegap sebagai pertimbangan mempekerjakan mereka di pertambangan timah. Selain itu, orang Sawang relatif tidak menuntut banyak dalam hal penggajian. Orang Sawang juga dinilai sebagai pekerja yang patuh dan mampu bekerja keras dari pagi sampai sore. Pada waktu itu hanya sebagian dari komunitas orang Sawang yang dipekerjakan di perusahaan timah, sebagian yang lain masih hidup di atas sampan beratap dan bermata pencaharian sebagai nelayan nomaden. Orang Sawang yang bekerja di perusahaan pertambangan timah pun pada waktu itu belum sepenuhnya terlepas dari pola kehidupan di atas laut karena pada hari libur seperti hari Minggu mereka masih pergi melaut mencari ikan (Purwana, 2015, hlm. 186).

Menurut kek Daud (78 Tahun) (dalam Purwana, 2015, hlm. 186) bahwa secara perlahan orang-orang Sawang yang masih hidup di atas sampan menjadi tertarik bekerja di

perusahaan pertambangan timah. Ketertarikan mereka setelah mendengar cerita saudara mereka yang secara rutin menerima gaji dan jatah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti setiap pekerja laki-laki mendapat beras 18 kg, istrinya 10 kg beras dan anak-anak masing-masing mendapat 10 kg beras setiap bulan.

Secara sosial budaya dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kehidupan Suku Sawang tidak jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Kehidupan Orang Laut masih banyak yang tinggal di atas perahu-perahu mereka, mencari nafkah di laut, dan tetap berpegang teguh pada tradisi mereka yang kental dengan kepercayaan animisme dan shamanisme. Hingga pada tahun 1936 ini terjadi perubahan yang terlihat adalah pada aspek ekonomi yakni mata pencaharian Suku Sawang Orang (Purwana, 2015, hlm. 186). Dengan demikian dapat kita lihat dari kehidupan Suku Sawang Belitung pada tahun 1936 bahwa tidak semua atau lebih tepat dikatakan bahwa hanya setengah dari populasi dari Suku Sawang yang bekerja sebagai buruh di perusahaan tambang timah yang di kelola Belanda. Selain itu,

Suku Sawang juga mulai menetap tinggal di darat sebagai pekerja kasar tambang dengan diberikannya perumahan oleh Belanda seperti di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Belitung Timur dan di daerah Birok di Tanjung Pandan. Sedangkan sebagian lagi Suku Sawang tetap menjalani kehidupan berdasarkan tradisi mereka dan bersifat nomaden.

Khusus pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 hingga akhir 1945 tidak begitu banyak keterangan mengenai gambaran kehidupan Suku Sawang di Belitung tersebut namun yang diketahui pasti pada zaman Jepang Pulau Belitung dianggap sebagai daerah logistik dan untuk sekedar bertahan. Jepang hanya peduli dengan aset-aset Belanda untuk di tenggelamkan atau aset-aset yang tetap dipertahankan seperti tambang timah dan pabriknya yang tentu saja berguna untuk kepentingan peperangan Jepang di Asia Pasifik. Selain itu banyak juga masyarakat di libatkan untuk berladang atau cetak sawah (Fithrorozi, Wawancara, 1 Januari 2016). Kondisi Indonesia yang tidak stabil sebagai negara yang baru lahir juga nampaknya menyebabkan minimnya keterangan dan catatan

mengenai Orang Laut Sawang dan pertambangan timah Belitung ketika masa awal kemerdekaan tahun 1945.

Hingga tahun 1953 hingga pada tahun 1968 saat perusahaan timah Belitung yang telah dinasionalisasi pemerintah berganti nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah yang merupakan PN Tambang Timah Belitung, Bangka, dan Singkep. Pada masa inilah Perusahaan Timah Belitung pernah mengalami masa kejayaannya. Suku Sawang yang turut mendampingi kelahirannya pun menjadi saksinya dan diantaranya masih tetap bekerja dan menggantungkan hidupnya dengan menjadi pekerja kasar antara lain menjadi penjahit karung timah, penyelam timah yang jatuh ke laut, pemotong besi dalam laut, bangkai kapal, tukang pikul karung timah serta buruh kasar lainnya dengan upah rendah. Meski sejak perlahan dan Suku Sawang sudah mengenal kehidupan di daratan, namun sebenarnya Suku Sawang tetap tidak bisa melepaskan kebiasaan lama dan hidupnya yang tidak bisa jauh dari laut sehingga masih banyak dari Suku Sawang yang hidupnya di atas perahu dan berpindah pindah.

Seiring waktu pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga memasuki masa pemerintahan Orde Baru, meski sudah terlanjur hidup dan mengenal kehidupan di darat terutama mereka Suku Sawang yang dahulu sudah dirumahkan dan bekerja di perusahaan timah Belanda, nyatanya masih banyak dari Orang-orang Sawang Belitung yang masih hidup seperti kehidupan asli mereka yakni berpencar-pencar dan mengembara di laut dengan perahu-perahu atau nomaden. Keadaan religi, ekonomi, sosial dan budaya mereka pun masih tak jauh-jauh dari kehidupan tradisi mereka. Berbeda pemerintahan maka akan berbeda kebijakan. Dengan adanya Repelita yang dimulai 1 April 1969 hingga Pelita VI sampai kejatuhan pemerintahannya pada 1998, pemerintah Orde Baru berusaha untuk menjalankan pembangunan berlandaskan Trilogi Pembangunan yang terdiri dari, *satu* stabilitas nasional yang dinamis, *dua* pertumbuhan ekonomi tinggi, dan *ketiga* adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Maka kata kuncinya adalah bagaimana usaha pemerataan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada akhirnya juga berpengaruh terhadap Suku Laut Sawang di Pulau Belitung yang pada saat itu masih termasuk bagian dari Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan buku *Proyek dan Sistem Pelayanan Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing* (1981) (dalam Rajak, 2015, hlm. Th), pemerintah memandang *indigenous people* (masyarakat adat) sebagai suatu masalah sosial. Lihat pernyataannya secara tegas “*masyarakat terasing adalah merupakan sebagian dari masalah sosial di Indonesia*” (1981). Mereka dianggap sebagai suatu permasalahan sosial karena dengan keterasingan dan keterbelakangannya akan membuat mereka menjadi kelompok masyarakat yang rawan sosial. Paradigma pembangunan yang digunakan adalah pembangunan yang sifatnya *top-down*, istilah yang dipakai adalah “pembinaan”. Untuk melaksanakan pembinaan itu maka dibuatlah Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT).

Jadi jelas bahwa faktor awal yang mendorong pemerintah yang

dalam hal ini Depatemen Sosial (Depsos) untuk melaksanakan pembinaan terhadap Komunitas Suku Terasing ini adalah paradigma atau pandangan terhadap masyarakat adat sebagai sebuah masalah sosial yang lekat dengan kemiskinan, ketertinggalan dan lain-lain sehingga perlu untuk dibina. Untuk memantapkannya/menstabilkannya maka pemerintah membuat program-program pembangunan untuk mereka. Agar kehidupan mereka stabil/mantap, kehidupan mereka disesuaikan dengan norma-norma standar yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Seperti memeluk agama resmi yang diakui oleh pemerintah, hidup di desa dan lain-lain

Pemberdayaan Masyarakat Terasing lewat program Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) di Belitung tercatat pernah melakukan usaha pemberdayaan dimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Kanwil Depsos Kabupaten Belitung pada saat itu lebih kepada upaya relokasi pemukiman dan proses Peng-Islaman. Adapun pola pemberdayaan yang dilakukan kepada Suku Sawang Belitung pada masa

pemerintahan Orde Baru ini adalah sebagai berikut;

1. Relokasi Pemukiman

Relokasi pemukiman suku laut dari pesisir ke daratan yang pertama dilakukan pada tahun 1970-an saat Suku Sawang yang ada dimukimkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung di Desa Paal Satu. Pemukiman tersebut yang sebelumnya yang diberi nama Kampung Laut. Di perkampungan ini dibuat sebuah tempat ibadah berupa surau. Kepada Orang Laut yang masuk Islam diberikan pula perlengkapan shalat berupa kopiah, Sarung, Baju koko dan sajadah untuk pria dan mukenah, sarung, serta sajadah untuk wanita. Kiranya pada awalnya masih terlihat cukup banyak yang melakukan shalat di surau tersebut, namun lambat laun surau ini pun mulai kurang jamaahnya (Hoogstad, 2009, hlm. 15).

Upaya pemberdayaan yang kedua dilakukan sekitar tahun 1985 dengan membuat mereka rumah tinggal yang berdekatan dengan Sungai Cerucuk (Desa Juru Seberang). Pada mulanya rumah-

rumah dihuni sekitar 100-an kepala keluarga namun kegiatan ini pun tampaknya tidak membuahkan hasil, lambat laun mereka meninggalkan rumah bantuan tersebut. Menurut dukun suku laut, Husin memperkirakan ada sekitar 100-an kepala keluarga yang saat menetap di Juru Seberang yang telah menetap sejak tahun 1985 (Fithrorozi, 2009, hlm. 44). Ide utama pemerintah dengan merumahkan masyarakat terasing tersebut dalam satu lokasi tersebut adalah untuk membuat mereka menetap disana akan memantapkan dan menstabilkan kehidupan masyarakat terasing tersebut. Dengan di “dirumahkan” tersebut juga diharapkan mereka sendiri akan mengalami proses belajar sosial mengenai budaya dan pengetahuan baru dari komunitas luar. Keterbukaan terhadap budaya luar ini, merupakan kondisi yang dapat mendukung upaya perubahan pada komunitas.

2. Konversi Agama

Dengan latar belakang kehidupan religi mereka yang menganut animisme dan

shamanisme dalam kaca mata pemerintah memang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern di darat yang dinilai jauh sudah maju dan beradab maka pola pembinaan Suku Terasing tersebut pun diikuti dengan proses konversi agama. Program pembangunan permukiman komunitas orang Sawang di Kelurahan Paal Satu, Tanjung Pandan pada tahun 1970-an dan Desa Juru Seberang, Tanjung Pandan pada tahun 1985 dilandasi oleh permikiran bahwa komunitas orang Sawang sebagai pengembara di laut “tidak beragama” dan dianggap penyembah hantu laut. Program permukiman untuk orang-orang Sawang di wilayah Kabupaten Belitung khususnya di Kecamatan Tanjung Pandan mengemban “misi suci” untuk meng”Islam”kan orang-orang Sawang agar mereka meninggalkan kepercayaan animisme-shamanisme. Pemda Belitung membangun surau dan memberi hadiah sarung, baju, kopiah, dan seperangkat alat salat bagi orang Sawang yang menyatakan diri masuk Islam (Purwana, 2015, hlm. 195).

Pembangunan pada masa pemerintah Orde Baru yang menerapkan pemukiman Suku Orang Laut ke daratan dari laut ternyata ada upaya-upaya untuk mengubah nilai-nilai tertentu pada kelompok etnis sampan ini dengan cara memunculkan kesadaran akan nilai Islam yang ditularkan dari adat orang Melayu. Program pemerintah untuk “memberadabkan” Orang Suku Laut, walaupun awalnya mereka berkenan untuk tinggal di rumah-rumah panggung itu namun sebagian dari mereka kembali ke kehidupannya lagi di atas laut. Hal ini disebabkan oleh cara pandang Orang Suku Laut terhadap daratan yang berbeda dengan orang Melayu (Erwin, 2015, hlm. 6-7).

Pada relokasi pemukiman seperti di Desa Juru Seberang memang awalnya memang cukup banyak yang berhasil dirumahkan namun seiring waktu hambatan pun muncul yakni soal mentalitas mereka yang masih sebagai suku laut dan belum siap akan sistem ekonomi dan kehidupan yang baru. Seperti tidak sedikit dari mereka yang malah kembali hidup ke laut dan setiap fasilitas yang disediakan

mereka jual seperti rumah bantuan yang diberikan sebelumnya. Adapun yang perlu diperhatikan disini adalah mentalitas yang ada tidak disertai juga dengan pembinaan oleh pemerintah dan hanya dirumahkan saja (Hoogstad, Wawancara tanggal, 31 Desember 2015).

Begitu pun yang terjadi pada usaha koversi agama sebelumnya yang dilakukan terhadap Suku Sawang. Surau-surau dan mushola yang dahulu sempat terisi semakin lama semakin berkurang jamaahnya dikarenakan ditinggal seiring kembalinya mereka ke kehidupan mereka di laut ataupun ada diantaranya yang menjual rumah tersebut dan membangun rumah sendiri dikarenakan tidak suka ataupun tidak sesuai dengan tempat dan bantuan yang diberikan. Nampaknya usaha untuk melakukan perubahan sosial budaya dengan disengaja dan direncanakan tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan hingga yang tersisa adalah mental materialistis yang ditinggal terhadap Komunitas Suku Sawang tersebut yang nanti terus melekat

pada ciri kehidupan mereka di darat.

Meski telah dibina dalam program-program pemerintah, Orang Sawang masih bergantung sebagai pekerja tambang timah seperti di masa-masa sebelumnya yang malah berakibat buruk terhadap Suku Sawang sendiri. Hal tersebut ditambah dengan tingkat pendidikan Suku Sawang yang masih rendah sehingga belum mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi baru yang ada. Pada tahun 1990-an saat pertambangan timah Belitung mulai menunjukkan kemundurannya, Orang-orang Sawang tersebut masih ada yang bekerja sebagai buruh-buruh kasar. Hingga akhirnya tahun 1998 saat PT Timah dipindahkan ke Bangka beriringan dengan itu pula banyak pekerja yang di PHK dan banyak dari Orang Sawang yang kehilangan pekerjaannya.

Bagi masyarakat Sawang yang masih berprofesi sebagai nelayan, selain kepala keluarga, anak yang sudah remaja tentu membantu orang tua mencari hasil laut. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh tambang timah yang dikelola secara mandiri seperti pertambangan rakyat di Juru Seberang, di mana hasilnya

dijual langsung kepada pengumpul. Artinya setelah PT. Timah tidak beroperasi, sebagian masyarakat Suku Sawang bekerja sebagai buruh di pelabuhan. Adapun peran ibu rumah tangga adalah membantu suami dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya terutama yang masih usia balita, dan remaja dan mengajarkan tentang kejujuran, keuletan penanaman nilai-nilai agama dan tradisi Suku Sawang yang masih dianggap relevan dan kondisi kekinian, yaitu cinta damai (Salman, 2011, hlm. 136).

Pemerintah pun menganggap bahwa Suku Sawang sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai Suku Terasing atau Komunitas Adat Terpencil dikarenakan mereka sudah berbaur dengan masyarakat setempat dan sulit membedakan yang mana Suku Sawang dan mana yang bukan dan hal ini berdampak kepada sulitnya pemberian pemberdayaan dan bantuan. Jikalau didapati Orang Sawang di kedua desa tersebut maka akan sulit juga menemukan keturunan Suku Sawang asli yang sekarang bisa dihitung dengan jari. Pemerintah juga mempertimbangkan faktor kecemburuan sosial dari masyarakat di

sekitar atas bantuan dan pembinaan yang terus diberikan kepada Orang Laut Sawang yang memang kenyataannya kurang efektif adanya (Bu Nurlianti, Wawancara tanggal 13 Januari 2016). Hingga akhirnya pada tahun 2012 Daerah Propinsi Bangka Belitung dinyatakan bebas daerah tertinggal atau daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT) setelah sebelumnya dilakukan survei terakhir oleh Kementerian Sosial RI bahwa satu daerah di Kabupaten Belitung yaitu Desa Pulau Batu sudah bebas dari katagori daerah KAT yang diikuti dengan dengan pemberhentian bantuan dana pemberdayaan KAT oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan teori Strukturasi Giddens menjadi lebih mudah dipahami jika kita melihat bisa saja kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dengan mendaratkan Suku Laut oleh pemerintah tidak kan menjadi sebuah resistensi apabila struktur yang ada memunculkan kebutuhan untuk melakukan sebuah perubahan. Artinya Kebijakan PKAT bisa saja tidak menimbulkan resistensi ketika ada kebutuhan dibalik perubahan itu. Ketika Suku Laut didaratkan dan

dirumahkan mereka menemui suatu kondisi dimana struktur sosial budaya dan ekonomi dari mayoritas yang ada di sekeliling mereka sama sekali berbeda dengan yang mereka miliki. Maka untuk bisa bertahan atau *survive* di tengah struktur tersebut maka mau tidak mau mereka harus menyesuaikan diri dan melakukan perubahan sesuai dengan sistem atau struktur sosial yang berlaku pada masyarakat di daratan (*kekangan/contraining*) yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada perubahan struktur sosial dan budaya Suku Laut Tersebut.

Namun memang yang terjadi saat mereka Suku Sawang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan struktur sosial yang ada di masyarakat darat ada kejutan budaya atau *cultural shock* dikarenakan adanya sistem sosial budaya yang jauh berbeda dan bahkan seiring waktu terjadi yang dinamakan *cultural lag* atau ketimpangan budaya yang disebabkan juga oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah. Maka tugas pemerintah ialah untuk mengadakan program pembinaan Masyarakat Terasing hingga pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk memfasilitasi dan membantu Suku Sawang untuk

menyesuaikan diri dengan struktur sosial yang ada. Karena suatu suku bangsa selama ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan struktur yang ada baik ekonomi maupun politik, maka suku tersebut akan selalu menjadi orang pinggiran dan terpinggirkan.

Namun perubahan yang direncanakan pemerintah terhadap Suku Sawang malah malah berproses kepada fase selanjutnya dari akulturasi yakni asimilasi dan mengarah kepada perubahan-perubahan yang tidak diharapkan terjadi. Asimilasi adalah suatu proses percampuran dari kedua budaya yang berbeda yang membuat kedua kebudayaan tersebut terlihat menyatu dengan menghilangkan ciri khas dari budaya yang ada sebelumnya. Proses asimilasi yang terjadi lambat laun dapat dilihat dari mulai menghilangnya budaya maritim Suku Laut seperti mulai sedikitnya penutur bahasa asli Suku Sawang, sudah membaurnya Suku Sawang dengan masyarakat setempat melalui perkawinan hingga banyaknya Orang Sawang sendiri yang tidak mengakui identitasnya sebagai Suku Laut dikarenakan stereotipe masyarakat terhadap Suku Sawang yang

menganggap mereka asing dan terpinggirkan baik secara sosial maupun ekonomi, bahkan Suku Sawang sering disebut dengan sebutan “*Suku Sekak*” yang berkonotasi jorok.

Dapat dipahami juga bahwa kenapa pemerintah kesulitan melakukan program pemberdayaan terhadap mereka yang bisa dikatakan mengalami kemiskinan, mengingat yang terjadi pada mereka sebenarnya adalah bentuk dari kemiskinan kultural yakni kemiskinan yang justru disebabkan dari internal atau dari kebudayaan dan gaya hidup Suku Sawang itu sendiri yang sulit dirubah dan telah mengakar meski telah ada upaya perubahan dari pihak-pihak tertentu. Hal tersebut bisa dipahami seperti yang diungkapkan dalam teori “kemiskinan budaya” yang dikemukakan oleh Oscar Lewis menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya (Wahyuni dan Yusuf, 2012, Th).

SIMPULAN

Suku Sawang Belitung sebagai Suku Laut memang memiliki sejarah panjang seluas lautan yang menjadi tempat tinggal asli pelaut dari Tanah Belitung tersebut. Pada perkembangan selanjutnya Suku Sawang ini sudah mulai menetap di darat ketika perusahaan timah Belanda beroperasi dan mereka dipekerjakan sebagai buruh tambang hingga di relokasi pemerintah Indonesia ke daratan dan di beri suatu program pembinaan. Namun yang malah terjadi justru mentalitas negatif dari Orang Laut masih belum berubah. Sebaliknya, perubahan yang terjadi nampaknya adalah perubahan yang tidak diharapkan dimana tercabutnya akar kebudayaan maritim Suku Sawang Belitung yang telah terbangun berpuluh bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Perubahan sosial yang terjadi membuat adat dan tradisi bahari Suku Sawang yang seharusnya terjaga serta dilestarikan terancam punah sepenuhnya di masa kini. Punah nya kebudayaan bahari Orang Sawang dan diperburuk dengan semakin sedikitnya wujud Orang Sawang asli disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Merasa Malu Akan Identitas Pribadi sebagai Suku Sawang atau Muang Suku
2. Adanya Perkawinan Campuran Dengan Masyarakat Melayu Belitung
3. Semakin Berkurangnya Para Tetua Atau Suku Sawang Asli

Penulis melihat bahwa proses kepunahan yang terjadi pada kebudayaan maritim Suku Sawang tidak lah bijak apabila dikatakan bahwa penyebab utamanya adalah karena pemerintah melakukan relokasi dengan program-programnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemerintah mempunyai niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Sawang hingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan menyesuaikan kebudayaan Sawang yang sudah tidak lagi sesuai seperti kepercayaan mereka hingga kepada ekonomi dan kesehatannya.

Dari fakta sejarah yang ditemukan justru yang pertama kali memperkenalkan kehidupan daratan dan membuat Orang Sawang perlahan-lahan tinggal di darat adalah pada masa Pemerintahan Hindia

Belanda yang justru tujuannya ialah untuk “mengeksplorasi” tenaga dan jasa Orang-orang Sawang lewat perusahaan tambang timahnya di Belitung. Jika dilihat dimasa kini masih banyak Orang-orang Sawang yang terjebak dalam kemiskinan, hal tersebut juga tidak bisa dikatakan karena program-program pemberdayaan pemerintah yang gagal, namun juga dikarenakan adanya kemiskinan kultural yakni kemiskinan yang justru disebabkan karena kebudayaan dan mentalitas negatif dari Orang Sawang sendiri yang sukar untuk dirubah.

Tentu yang penulis maksud kebudayaan maritim yang perlu dilestarikan disini adalah kebudayaan positif dari Orang Sawang yang penting untuk dilestarikan sebagai jati diri bangsa seperti kesenian maritim, bahasa Orang Laut, pengobatan-pengobatan tradisonal yang bermanfaat, serta nilai-nilai positif yang terkandung seperti semangat gotong royong yang tercermin dalam tradisi *muang jong*, semangat menjaga ekosistem laut dan beberapa kearifan lokal Orang Sawang lainnya yang sangat kaya. Dimasa kini memang Orang Sawang sudah tidak lagi

terasing dengan telah membaurnya Orang Laut di lingkungan masyarakat Belitung. Akan tetapi Orang Laut masih tetap terasing dan terpinggirkan secara ekonomi, pendidikan, maupun politik selama Suku Sawang masih belum menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masih terjebak dalam kemiskinan dan jauh dari kata kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Erwin. (2015). *Interaksi Sosial Suku Laut Dengan Masyarakat Sekitarnya di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga*. (Skripsi). Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Guna, A. (2014). *Jelajah Sejarah: Kota Gantong, Majalah Visit Belitim Edisi 7 Tahun 2014*. Manggar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, hlm 28-30.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI-Press.
- Hamid, A. (2013). *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Ismaun. (2005). *Sejarah Sebagai Ilmu*. Bandung: Historis Utama Press.
- Salman, D, dkk. (2011). *Jagad Bahari Nusantara*. Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata..
- Sjamsuddin. H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Wahyuni, S dan Yusuf, M. (2012). *Perempuan Miskin Dalam Keterisolasiannya (Studi Perempuan Komunitas Adat Terpencil)*. (Penelitian). Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.

Sumber Artikel Jurnal:

Purwana, Bambang HS. (2015). Ritual Muang Jong: Identitas Kolektif Komunitas Orang Sawang di Pulau Belitung. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, 16 (2), Hlm. 179-203.

Sumber Internet:

Rajak, A. (2015). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Komunitas Adat Terpencil (KAT)* (Online). Tersedia: (<http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIS/article/.../6699>)

Sumber Arsip:

Fithrorozi. (2009). Suku Laut, Pesisir dan Budaya Maritim I, *kolom, Warta Praja, edisi 09/Th*

IV/September 2009. Belitung: Pemkab Belitung.

Hoogstad, S.Y.A. (2009). Suku Sawang Belitung dan Muang Jong, *kolom, Warta Praja, edisi 07/Th IV/July 2009*. Belitung: Pemkab Belitung.

Sumber Wawancara:

Wawancara dengan Fithrorozi, Penulis dan Budayawan Belitung (44 th), tanggal 1 Januari 2016 di Tanjung Pandan, Kabuapten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

Wawancara dengan Salim Yan Albert Hoogstad, Pemerhati Budaya dan Sejarah Belitung (58 th), 30 Desember 2015 di Perawas, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung

Wawancara dengan Nurlianti, Mantan anggota Pelaksana lapangan program pemberdayaan Suku Sawang Belitung oleh Dinas Sosial (50 th), tanggal 13 Januari 2016 di Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung.